



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsure Penyelenggara Negara agar membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, RSUD Prov. NTB sebagai satuan kerja perangkat daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Prov. NTB Tahun 2016 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Prov. NTB Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur dan seharusnya dicapai oleh RSUD Prov. NTB serta dapat mendorong RSUD Prov. NTB



didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, terutama dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah RSUD Provinsi NTB

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut RSUD Prov. NTB berlokasi di Jalan Praburangkasari Dasan Cermen Mataram memiliki luas lahan 125.000 m² dan luas bangunan 57.206 m².

Gedung lama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jalan Pejanggik no. 6 Mataram didirikan ± tahun 1915 merupakan gedung peninggalan pemerintah Kolonial Belanda, terletak ditengah-tengah Kota Mataram dan dibangun di atas areal tanah seluas 2,5 ha dan merupakan gedung Sekolah Dasar (HIS). Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, gedung tersebut tidak lagi dipergunakan sebagai tempat pendidikan, melainkan dipergunakan sebagai tempat Palang Merah. Beberapa waktu kemudian penggunaannya berubah sebagai Rumah Sakit (Rumah Sakit Beatrix). Antara tahun 1947-1948 nama Rumah Sakit Beatrix diubah menjadi Rumah Sakit Umum Mataram dan merupakan bagian dari Dinas Kesehatan Rakyat Lombok. Pada masa itu beberapa gedung dibangun untuk menambah/melengkapi gedung yang telah ada sesuai kebutuhan waktu itu.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 448/Pem.47/5/151 tanggal 5 Nopember 1969, status Rumah Sakit Umum Mataram yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diubah menjadi milik dan pengelolaannya dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah Mataram. Pada awal tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13/Menkes/SK/I/2005 tentang Peningkatan Kelas, terjadi perubahan status



pada Rumah Sakit Umum Daerah Mataram dari Rumah Sakit Kelas B menjadi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan. Pada tahun 2011 RSUD Provinsi NTB status pengelolaannya ditetapkan menjadi PPK-BLUD melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 tahun 2011. Berdasarkan Perda No. 8 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 mengubah nomenklatur RSUD Mataram menjadi RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan ke dua atas Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomenklatur Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Tugas RSUD Provinsi NTB:

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit Kelas B Pendidikan.

3. Fungsi RSUD Provinsi NTB

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, RSUD Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan medis
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan



5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya
7. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

4. Kepegawaian

Salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang akan menggerakkan dan melaksanakan tugas organisasi. Status pegawai yang ada di RSUD Provinsi NTB saat ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Distribusi SDM RSUD Provinsi NTB Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin tahun 2016

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	354	516	870
2	Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)	3	2	5
3	Pegawai Non ASN	135	144	249
4	Dokter Paruh Waktu	15	7	22
5	Dokter Kontrak	3	3	6
Jumlah		510	642	1152

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov NTB

Pegawai RSUD Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas sehari-hari berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan jabatan/ kompetensi masing-masing. Jenis jabatan yang ada di RSUD Provinsi NTB, yaitu jabatan struktural (eselon), jabatan non struktural umum (administrasi) dan jabatan non struktural khusus (fungsional), dengan distribusi sebagai berikut :



Tabel 1.2 Distribusi PNS RSUD Provinsi NTB Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Jenis Jabatan	Jenis Kelamin		Jml
		Laki-laki	Perempuan	
1	Struktural	17	10	27
2	Non Struktural			
	a. Non Struktural Umum	127	74	201
	b. Non Struktural Khusus/ Fungsional	211	431	642
Jumlah		355	515	870

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov NTB

Jenis Jabatan Fungsional yang ada di RSUD Provinsi NTB Tahun 2016 sebanyak 21 jenis jabatan fungsional (Jafung), yaitu :

- 1) Jabatan Fungsional Dokter
- 2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinik
- 3) Jabatan Fungsional Dokter Gigi
- 4) Jabatan Fungsional Perawat
- 5) Jabatan Fungsional Perawat Gigi
- 6) Jabatan Fungsional Tekhniker Gigi
- 7) Jabatan Fungsional Bidan
- 8) Jabatan Fungsional Apoteker
- 9) Jabatan Fungsional Asisten Apoteker
- 10) Jabatan Fungsional Perkam Medis
- 11) Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
- 12) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium
- 13) Jabatan Fungsional Radiografer
- 14) Jabatan Fungsional Terapis Wicara
- 15) Jabatan Fungsional Okupasi Terapi
- 16) Jabatan Fungsional Refraksionis
- 17) Jabatan Fungsional Fisioterapis
- 18) Jabatan Fungsional Nutritionis
- 19) Jabatan Fungsional Sanitarian
- 20) Jabatan Fungsional Perencana
- 21) Jabatan Fungsional Umum

Dua puluh satu jenis jabatan fungsional (kecuali fungsional umum) tersebut masing-masing memiliki strata yang berbeda-beda.

Distribusi SDM Fungsional RSUD Provinsi NTB Tahun 2016 menurut jenis jabatan dan jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel berikut:



Tabel 1.3 Distribusi SDM Fungsional RSUD Provinsi NTB Tahun 2016

No	Jenis Jabatan fungsional	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dokter Spesialis	30	20	50
2	Dokter Umum	16	31	47
3	Dokter Gigi	1	2	3
4	Paramedis keperawatan	110	275	385
5	Paramedis non keperawatan	54	103	157
Jumlah		211	431	642

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov NTB

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit, bahwa kebutuhan dokter spesialis RS Tipe B sebanyak 56 orang, sementara yang ada saat ini di RSUD Provinsi NTB sebanyak 50 orang. Adapun rincian jenis dan jumlah dokter spesialis sebagai berikut:

Tabel 1.4 Rincian Dokter Spesialis di RSUD Provinsi NTB Tahun 2016:

No	Nama Spesialisasi	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Spesialis Anak (DSA)	3	3	6
2	Spesialis Anestesi (DSAN)	1	4	5
3	Spesialis Bedah (DSB)	6		6
4	Spesialis Bedah Mulut (DSBM)		1	1
5	Spesialis Emergency (DSEm)		1	1
6	Spesialis Jantung (DSJ)		1	1
7	Spesialis Keterampilan Fisik dan Rehabilitasi (DSKFR)		2	2
8	Spesialis Konservasi Gigi (DSKG)		1	1
9	Spesialis Kulit dan Kelamin (DSKK)	1	1	2
10	Spesialis Mata (DSM)	2	1	3
11	Spesialis Obgyn (DSOG)	5		5
12	Spesialis Otrhopedi (DSBO)	1		1
13	Spesialis Paru (DSP)	2	1	3
14	Spesialis Patologi Klinik (DSPK)		1	1
15	Spesialis Penyakit Dalam (DSPD)	4		4
16	Spesialis Radiologi (DSR)	1	1	2
17	Spesialis Syaraf (DSS)	1	1	2
18	Spesialis THT (DTHT)	2	1	3
19	Spesialis Urologi (DSU)	1		1
JUMLAH		30	20	50

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUP NTB



Kekurangan Dokter Spesialis di RSUD Provinsi NTB telah diupayakan melalui pendidikan dokter umum ke jenjang dokter spesialis maupun dokter spesialis ke sub spesialis baik yang didanai oleh APBD Provinsi NTB, Universitas Mataram (Unram) maupun Kementerian Kesehatan. Namun, program pendidikan dokter umum ke jenjang dokter spesialis maupun ke jenjang dokter spesialis ke subspecialis yang didanai oleh APBD Provinsi NTB terkendala karena belum keluar SK Tugas Belajar dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penundaan oleh Institusi Pendidikan terkait. Upaya lain yang telah dilakukan adalah dengan memberdayakan dokter-dokter spesialis Fakultas Kedokteran UNRAM sejalan RSUD Prov. NTB sebagai rumah sakit pengampu FK UNRAM. Dimana di dalam distribusi SDM RSUD Provinsi NTB di sebut sebagai dokter paruh waktu, Adapun rincian dokter paruh waktu RSUD Provinsi NTB Tahun 2016, sebagai berikut:

Tabel 1.5 Rincian Dokter Paruh Waktu RSUD Provinsi NTB Tahun 2016

No	Nama Spesialisasi	Jumlah		Total (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Spesialis Anestesi (DSAN)	1		1
2	Spesialis Bedah Syaraf (DSBS)	2		2
3	Spesialis Forensik (DSF)	1		1
4	Spesialis Jantung (DSJ)	1	1	2
5	Spesialis Kulit dan Kelamin (DSKK)	1		1
6	Spesialis Mata (DSM)		4	4
7	Spesialis Obgyn (DSOG)	1		1
8	Spesialis Paru (DSP)		1	1
9	Spesialis Penyakit Dalam (DSPD)	3		3
10	Spesialis Radiologi (DSR)		1	1
11	Spesialis Syaraf (DSS)	1		1
12	Spesialis THT (DTHT)	2		2
13	Spesialis Urologi (DSU)	2		2
JUMLAH		15	7	22

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUP NTB



5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada lampiran 1.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran RSUD Provinsi NTB dalam pembangunan daerah adalah mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dengan melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit Kelas B Pendidikan baik di rawat jalan, rawat inap, maupun rawat darurat. Muara akhirnya adalah meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat NTB sehingga mampu berdayasaing. Pelayanan yang diberikan di RSUD Provinsi NTB meliputi pelayanan medis spesialistik, pelayanan medis canggih, maupun pelayanan unggulan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi RSUD Provinsi NTB (masalah-masalah yang dihadapi secara internal) dan beberapa isu yang mengemuka antara lain:

1. Pelayanan RSUD Pemerintah belum optimal dan berdaya saing,
2. Pelayanan keperawatan RSU pemerintah belum sesuai standar.
3. Administrasi ketatausahaan belum tertib dan lancar.
4. Administrasi keuangan belum transparan dan akuntabel.
5. Rencana program kurang terarah dan terpadu.
6. Output Pendidikan dan Pelatihan belum sesuai harapan.



7. Output penelitian dan pengembangan belum sesuai kebutuhan.

Disamping itu terdapat juga beberapa isu-isu strategis yang merupakan isu-isu nasional, antara lain:

1. Pelayanan pasca Relokasi RS
2. Penerapan pasien Safety
3. Standar Akreditasi Baru RS
4. Optimalisasi Sumber Daya Siaga Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)
5. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
6. BPJS dan aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin (SHI social Health Insurance)
7. Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas System Informasi Manajemen Rumah Sakit
8. Peningkatan Status RS menjadi Kelas A

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB terus berupaya melakukan perbaikan dan pengembangan baik fisik maupun peralatan untuk mewujudkan *customer satisfaction* melalui *medical excellence, service excellence dan finance excellence*. Upaya-upaya tersebut antara lain penambahan kapasitas Tempat Tidur menjadi 607 kapasitas tempat tidur, meningkatkan kompetensi petugas melalui pendidikan formal (dokter spesialis ke sub spesialis, dokter umum ke spesialis dll) maupun informal (diklat-diklat teknis) serta Pengembangan pelayanan pusat pelayanan jantung dan pembuluh terpadu, pusat pelayanan intervensi paru menjadi pelayanan unggulan di tahun 2016.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja RSUD Prov. NTB, ditetapkan indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama RSUD Prov. NTB sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama RSUD Prov. NTB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya SPM dan SOP yang memadai	Kepuasan Pelanggan (indeks)
2	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan public yang memadai	a. Jumlah gedung yang terbangun b. Jumlah alat kedokteran/kesehatan yang tersedia
3	Terwujudnya aparatur yang professional	a. Jumlah dokter spesialis ke sub spesialis b. Jumlah dokter umum ke spesialis c. Jumlah pelatihan dan pengembangan SDM

1. Kepuasan pelanggan (indeks).

Untuk mengetahui tingkat apresiasi mutu layanan oleh pelanggan (pasien) yang selanjutnya dipetakan menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IKM yang kemudian digunakan mengevaluasi kinerja masing-masing unit kerja di lingkungan RS. Adapun formulasi yang digunakan dalam perhitungan IKM adalah jumlah pasien yang disurvei secara acak yang menyatakan puas dibandingkan jumlah pasien yang disurvei secara acak.

2. Jumlah gedung yang terbangun dan Jumlah alat kedokteran/kesehatan yang tersedia.

- Indicator kinerja ini untuk memenuhi kebutuhan sarana sesuai standart dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan RS. Adapun formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah gedung yang dibangun sesuai rencana dan alokasi anggaran yang tersedia. Formulasi kedua yang digunakan adalah jumlah alat kedokteran/kesehatan yang tersedia sesuai dengan anggaran yang teralokasi.



3. Jumlah dokter spesialis ke sub spesialis, dokter umum ke spesialis, pelatihan dan pengembangan SDM.

Indicator kinerja ini untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM RS sesuai kebutuhan RS kelas A. Adapun formulasi perhitungan yang digunakan adalah :

- Jumlah dokter spesialis yang melanjutkan pendidikan ke sub spesialis
- Jumlah dokter umum yang melanjutkan pendidikan ke spesialis
- Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihann dalam 1 periode.

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 dituangkan kedalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 yang berisi penjabaran visi, misi dan program yang direncanakan dalam kurun waktu lima tahun yang selanjutnya telah direvisi pada bulan Agustus 2016. Reviuw Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Review Renstra tahun 2013 – 2018 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun kedepan.

1) VISI ,MISI, TUJUAN DAN SASARAN RSUD PROVINSI NTB

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Review Rencana Strategis RSUD Provinsi NTB adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Provinsi NTB Tahun 2013-2018

VISI : Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang Unggul dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian di Indonesia Timur

MISI	TUJUAN	SASARAN
Pertama : Meningkatkan Kelancaran dan Ketepatan Pelayanan Kedokteran Yang Profesional Selaras Dengan Perkembangan Iptekdok	1. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan efektivitas pelayanan medis di IRI, IRJ, IRD, ICU, IBS, Anastesi, HD, Rehabilitasi Medik, dan Rekam Medis	1 Tersedianya gedung dan seluruh infrastruktur RSUD Prov. NTB di Dasan Cermen sesuai standar RS Kelas A
		2 Tertata dan terkelolanya pelayanan medis rumah sakit secara efisien, safety, dan bermutu
		3 Terwujudnya layanan medis RS sesuai RS Pusat Rujukan (Kelas A)
		4 Tersedia dan terkelolanya SDM yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan RS Kls A
		5 Tersedianya sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan pelayanan medis sesuai standar RS Kelas A
		6 Terpeliharanya sarpras yanmed secara baik
		7 Terwujudnya layanan medis di masing-masing unit pelayanan ke dalam SIM RS secara integrated
	2. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan efektivitas pelayanan penunjang medis di Lab, Radiologi, Gizi, Farmasi, Forensik & Pemulasaraan Jenazah	1 Tertata dan terkelolanya pelayanan penunjang medis RS secara efisien, safety, dan bermutu
		2 Terwujudnya layanan penunjang medis RS sesuai RS Pusat Rujukan (Kelas A)
		3 Tersedia dan terkelolanya SDM layanan penunjang medis yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan RS Kelas A
		4 Tersedianya sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan pelayanan penunjang medis sesuai standar RS Kelas A
		5 Terpeliharanya sarpras penunjang medis
		6 Terwujudnya layanan penunjang medis di masing-masing unit ke dalam SIM RS secara integrated
	Kedua : Meningkatkan Kelancaran dan Kemudahan Pelayanan Asuhan Keperawatan Yang Komprehensif	1. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas pelayanan keperawatan
2 Tersedia dan terkelolanya SDM keperawatan yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan RS Kelas A		
3 Tersedia, tertatadan terpeliharanya sarpras kerja keperawatan secara efisien dan efektif		
2. Meningkatkan		1 Terwujudnya layanan perawatan sesuai RS



MISI	TUJUAN	SASARAN
	kualitas rencana pengembangan perawatan	<p>Pusat Rujukan (Kelas A)</p> <p>2 Terwujudnya administrasi dan manajemen keperawatan dalam melaksanakan praktik keperawatan professional</p> <p>3 Tersedianya sarana dan prasarana kerja keperawatan yang memadai sesuai standar dan rencana pengembangan RS Kelas A</p>
Ketiga : Mendorong Kelancaran dan Ketertiban AdministrasiKegiatan Paripurna	1. Meningkatkan kualitas administrasi umum dan kepegawaian	1 Tertatanya adm. umum dan kepeg. secara tertib
		2 Tersedianya data dan formasi pegawai ke dalam SIM RS secara integrated
		3 Tersedia dan terkelolanya SDM adm. Umum dan kepegawaian yang professional dan kompeten sesuai kebutuhan
		4 Tersedianya sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan adm. Umum dan kepegawaian sesuai standar
		5 Terwujudnya lingkungan RS yang aman dan tertib
	2. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik negara/daerah	1 Tertatanya administrasi barang secara tertib
		2 Tersedia dan terkelolanya SDM pengelola barang yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		3 Terwujudnya data aset di masing-masing unit ke dalam SIM RS secara integrated
		4 Tersedianya sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan perlengkapan sesuai standar
	3. Meningkatkan sinergitas hubungan ke Masyarakat	1 Terjalannya hubungan kemasyarakatan yang harmonis
		2 Tersedia dan tertatanya sarana dan prasarana publikasi
		3 Tersedianya SDM kehumasan yang profesional dan kompeten
		4 Terwujudnya pengembangan layanan informasi, publikasi berbasis IT
	4. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan pemeliharaan dan penyehatan lingkungan	1 Terkelola dan terpeliharanya sarpras dan kebersihan lingkungan RS secara profesional
		2 Tersedia dan tertatanya sarana dan prasarana unit pemeliharaan sarpras dan penyehatan lingkungan RS sesuai standar
		3 Tersedianya SDM pemeliharaan sarpras dan penyehatan lingkungan (PSPL) yang profesional dan kompeten
4 Terwujudnya pengembangan layanan PSPL yang handal		



MISI	TUJUAN	SASARAN
	5. Meningkatkan kualitas dan fungsi aplikasi SIMRS	1 Terwujud dan terkelolanya layanan SIMRS dengan seluruh unit dan kegiatan RS secara integrated
		2 Tersedia dan tertatanya sarana dan prasarana Unit Sistem Informasi RS (SIRS) sesuai standar
		3 Tersedianya SDM Unit Sistem Informasi RS (SIRS) yang profesional dan kompeten
	6. Meningkatkan kualitas layanan sterilisasi dan binatu	1 Tertata dan terkelolanya pelayanan non teknis sterilisasi dan binatu secara baik dan professional
		2 Tersedianya SDM sterilisasi dan binatu yang profesional, bersikap baik dan handal
		3 Tersedianya sarana prasarana kegiatan sterilisasi dan binatu sesuai kebutuhan
Keempat : Mengoptimalkan Kinerja Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan	1 Tertata dan terkelolanya akuntabilitas keuangan rumah sakit secara profesional dan akuntabel
		2 Tersedia dan terkelolanya SDM yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		3 Terintergrasinya seluruh kegiatan akuntabilitas keuangan ke dalam SIM RS secara integrated
		4 Tersedianya sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan akutansi dan verifikasi
	2. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perbendaharaan dan mobilisasi dana	1 Tertata dan terkelolanya perbendaharaan dan mobilisasi keuangan rumah sakit secara profesional, efisien, dan transparan
		2 Tersedia dan terkelolanya SDM yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		3 Terintergrasinya seluruh kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana ke dalam SIM RS secara integrated
		4 Tersedianya sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan perbendaharaan dan mobilisasi dana
	3. Meningkatkan efektivitas, efisiensi anggaran dan belanja	1 Tertata dan terkelolanya sistem penyusunan anggaran belanja rumah sakit secara baik dan sistimatis
		2 Tersedia dan terkelolanya SDM penyusunan anggaran belanja RS yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		3 Terintergrasinya seluruh kegiatan penyusunan anggaran ke dalam SIM RS
		4 Tersedianya sarpras sesuai kebutuhan dan



MISI	TUJUAN	SASARAN
		rencana pengembangan penyusunan anggaran
	4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan klaim.	1 Tertata dan terkelolanya pelayanan administrasi dan klaim pasien dengan jaminan secara baik, transparan, tepat dan akurat
		2 Tersedia dan tertatanya SDM jaminan pelayanan klaim yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		3 Tersedia dan terpeliharanya sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan
		4 Terwujudnya layanan administrasi klaim pasien dengan jaminan ke dalam SIM RS secara transparan dan terpadu
Kelima : Memantapkan Keterpaduan dan Keseimbangan Perencanaan Program	1. Meningkatkan kualitas rencana program	1 Tertata dan tersusunnya Rencana Program RSUD Prov.NTB yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan
		2 Tersedianya SDM penyusunan program yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		3 Terwujudnya rencana program dan kegiatan ke dalam SIM RS dan sistem elektronik lainnya secara terpadu
		4 Tersedianya sarana dan prasarana sub penyusunan program sesuai standar
	2. Meningkatkan intensitas dan kontinuitas kerjasama antar lembaga.	1 Tertata dan terkelolanya pelayanan kerjasama rumah sakit dengan institusi lain secara profesional, efisien, dan transparan
		2 Tersedianya SDM hubungan antar lembaga yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		3 Terwujudnya seluruh jenis dan ruang lingkup kegiatan MOU RS, kedalam SM-RS secara terpadu
		4 Tersedianya sumber daya, sarana dan prasarana sub hubungan antar lembaga sesuai standar
	3. Meningkatkan kualitas laporan	1 Tertata dan terkelolanya hasil monev kegiatan rumah sakit secara profesional, akurat dan transparan
		2 Tersedianya SDM monev dan pelaporan yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		3 Terwujudnya seluruh jenis data, hasil monev dan pelaporan kedalam SIM-RS secara terpadu
		4 Tersedianya sumber daya, sarana dan prasarana sub monev dan pelaporan sesuai standar



MISI	TUJUAN	SASARAN
Keenam : Mengembangkan Ketersediaan, Kemampuan dan keterampilan Tenaga Medis/Non Medis	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	1 Tertata dan terkelolanya kegiatan pendidikan SDM di rumah sakit secara profesional
		2 Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan
		3 Tersedianya SDM unit pendidikan yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		4 Terwujudnya seluruh kegiatan pendidikan SDM RS dan praktek belajar mahasiswa/siswa kedalam SIM-RS secara terpadu
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan	1 Tertata dan terkelolanya kegiatan pelatihan SDM di rumah sakit secara profesional
		2 Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan
		3 Tersedianya SDM unit pelatihan yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		4 Terwujudnya seluruh kegiatan pelatihan SDM RS dan praktek belajar mahasiswa/siswa kedalam SIM-RS secara terpadu
Ketujuh : Meningkatkan Ketersediaan dan Keakuratan Data Hasil Penelitian	1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan penelitian	1 Tertata dan terkelolanya kegiatan penelitian di rumah sakit secara profesional
		2 Tersedianya sarana dan prasarana penelitian sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan
		3 Tersedianya SDM unit penelitian yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		4 Terwujudnya seluruh kegiatan penelitian kedalam SIM-RS secara terpadu
	2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pengembangan teknologi kesehatan	1 Tertata dan terkelolanya kegiatan pengembangan teknologi kesh di rumah sakit secara profesional
		2 Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan teknologi kesh sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan
		3 Tersedianya SDM unit pelatihan yang profesional, kompeten dan handal sesuai kebutuhan
		4 Terwujudnya seluruh kegiatan pengembangan teknologi kesh kedalam SIM-RS secara terpadu



C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA RSUD PROV. NTB 2013-2018

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui berbagai strategi dengan menetapkan kebijakan dan selanjutnya dituangkan dalam program dan kegiatan yang selaras agar output maupun outcome sesuai dengan yang diharapkan.

1. Strategi

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta dengan mencermati isu-isu strategis RSUD Provinsi NTB, maka strategi RSUD Provinsi NTB yang tertuang dalam Rencana strategik Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi internal dan eksternal Rumah Sakit baik horizontal maupun vertikal
- b. Advokasi beberapa stakeholder untuk mendukung upaya pengembangan Rumah Sakit
- c. Sosialisasi kemajuan rumah sakit, pengembangan layanan dan berbagai kebijakan
- d. Konsolidasi dengan berbagai berbagai fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta
- e. Konsultasi formal/informal kepada lembaga terkait (kesehatan/non kesehatan)
- f. Edukasi formal dan informal kepada karyawan RS secara berkesinambungan
- g. Sinkronisasi berbagai kebijakan yang ditetapkan dari berbagai institusi atau lembaga baik Pusat maupun Daerah
- h. Identifikasi kebutuhan, rencana pengembangan, masalah/kendala, faktor-faktor pendukung dan penghambat, kekuatan atau kelemahan RS secara berkesinambungan
- i. Standarisasi pelayanan/Akreditasi RS
- j. Rasionalisasi Tarif Pelayanan Rumah Sakit



- k. Diversifikasi pelayanan & penunjang medis, pelayanan keperawatan, dan Pelayanan ketatausahaan

2. Kebijakan

Kebijakan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan pembangunan/relokasi.
- b. Pengembangan manajemen mutu dan jenis pelayanan medis serta penunjang medis
- c. Perubahan status menjadi RS Kls A
- d. Peningkatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- e. Kerjasama dengan unit terkait
- f. Pembentukan tim teknis
- g. Penyesuaian tarif pelayanan
- h. Penyusunan / perubahan dokumen
- i. Perluasan jangkauan pelayanan
- j. Percepatan integrasi SIMRS
- k. Peningkatan pelaksanaan Dokter Paruh Waktu
- l. Rekrutmen pegawai non PNS
- m. Pengembangan manajemen mutu dan jenis pelayanan ketatausahaan
- n. Monev disiplin pegawai
- o. Penyediaan sarpras sesuai kebutuhan
- p. Bimbingan teknis
- q. Penyesuaian tarif pelayanan
- r. Pengembangan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel
- s. Rekrutmen SDM Keuangan yang kompeten
- t. Pendampingan tenaga ahli
- u. Peningkatan mutu perencanaan dan pengembangan program
- v. Pemanfaatan aplikasi sistem perencanaan
- w. Percepatan integrasi SIMRS pengembangan manajemen mutu pelayanan Diklat.
- x. Kerjasama dengan unit terkait



3. Program

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan dengan melaksanakan program dan kegiatan. Program yang ditetapkan oleh RSUD Provinsi NTB mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Perda Nomor 2 tahun 2014 yang tertuang dalam Reviu Rencana Strategis (renstra) mengelola 5 (lima) program untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD Prov. NTB dan APBN, serta 1 (satu) program untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari penerimaan BLUD. Adapun program-program tersebut adalah :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- d. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa//Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
- e. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
- f. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Prov. NTB tahun 2016 adalah :

- a) Program Administrasi Perkantoran
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 3. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 4. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal
- d) Program Peningkatan Kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1. Kegiatan Peningkatan Manajemen Asset/barang milik daerah
- e) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 1. Kegiatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
- f) Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular
 - 1. Kegiatan peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- g) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - 1. Kegiatan Penyusunan Standart Pelayanan Kesehatan
- h) Program Pengadaan; peningkatan sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata
 - 1. Kegiatan Pembangunan RS
 - 2. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS
 - 3. Kegiatan Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah
 - 4. Kegiatan Pengadaan Mebeuleur RS
- i) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata
 - 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala RS
 - 2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS
- j) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
 - 1. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

D. RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Kinerja mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra SKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang pada akhirnya di fokuskan pada Penetapan Kinerja (PK) yang memuat informasi tentang :



1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan
2. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis yang ingin dicapai
3. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan
4. Jumlah Anggaran yang mendukung program dan kegiatan

Penetapan Kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun 2016 terdiri dari 4 sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertata dan Terkelolanya kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM rumah sakit secara professional	1) Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal SDM RS	3 org dokter spesialis ke sub spesialis, 2 org dokter umum ke spesialis, 70 org diklat SDM RS, 100% pelatihan di unit khusus
2	Tertata dan terkelolanya pelayanan medis rumah sakit secara efisien, safety, dan bermutu	2) Jumlah pasien masyarakat miskin/tidak mampu dan masalah social lainnya yang terlayani	500 orang
3	Tersedianya gedung dan seluruh infrastruktur, sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan pelayanan dan penunjang medis sesuai standart RS Kelas A	3) Jumlah dan Jenis gedung serta infrastruktur, sarana prasarana dan alat-alat kedokteran/kesehatan sesuai standart RS A	2 unit dan 2 paket
4	Tertata dan terkelolanya sumber daya RS	4) Jumlah pendapatan dan belanja operasional RS 5) Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp.80.365.000.000 80%

Untuk lebih jelasnya Penetapan Kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran 2.



1. Tertata dan Terkelolanya kegiatan pendidikan dan Pelatihan SDM RS Secara Profesional.

Sebagai salah satu SKPD yang memberikan pelayanan public kepada masyarakat, RSUD Prov. NTB dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima. Pelayanan Prima salah satunya bisa dicapai apabila SDM yang ada berkualitas. Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas diperlukan pendidikan dan atau pelatihan, baik secara formal maupun non formal secara terus menerus. Kegiatan ini ditujukan kepada pegawai/karyawan agar meningkatkan kesadaran karyawan/pegawai untuk dapat memahami dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, mempunyai keahlian dan keterampilan dibidangnya masing-masing (teknis) sehingga mampu memberikan pelayanan secara efektif, efisien, dan safety.

2. Tertata dan terkelolanya pelayanan medis rumah sakit secara efisien, safety, dan bermutu.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan berupa peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan merupakan wujud kepedulian RSUD Prov. NTB pada masalah kesehatan. Setiap tahun jumlah kunjungan cenderung mengalami peningkatan, baik kunjungan rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Berdasarkan strata social, pasien yang datang bervariasi. Salah satunya dari kalangan tidak mampu/miskin, melalui kegiatan ini RSUD Prov. NTB mempunyai kepedulian social untuk membantu pengobatan masyarakat yang miskin/tidak mampu ataupun masalah social lainnya.

3. Tersedianya gedung dan seluruh infrastruktur, sarpras sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan pelayanan dan penunjang medis sesuai standart RS Kelas A

Setiap tahun jumlah kunjungan pasien yang berobat ke RSUD Prov. NTB cenderung mengalami peningkatan dengan kasus penyakit bervariasi.



Peningkatan jumlah kunjungan pasien serta kasus penyakit yang bervariasi menyebabkan kebutuhan akan ruang perawatan dan alat kesehatan RS juga meningkat. Pembangunan gedung RS pada tahun 2016 merupakan lanjutan terhadap pembangunan ditahun sebelumnya. Selain melanjutkan pembangunan di tahun 2016, RSUD Prov. NTB juga melakukan pengembangan layanan dengan membentuk ruang RICU, ruang PICU, ruang kemoterapi, ruang Burn Unit, ruang otak kokok, pengembangan ruang tindakan rawat inap, stroke unit, poli TB-DOT, penambahan ruang IBS menjadi 9 ruang, ruang pelayanan jantung terpadu, ruang HCU/RIO.

Untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan RS, RSUD Prov. NTB mendapatkan dana DAK dan DBCHT. Untuk tahun 2016 RSUD Prov. NTB mendapatkan dana DAK sebesar Rp. 5.830.788.000,- yang dipergunakan untuk membeli alat mesin anastesi, ventilator, pasien monitor, lampu operasi, ECG, maja ginekologi, dan nebulizer neonatal. Sedangkan dana DBCHT RSUD Prov. NTB mendapatkan dana sebesar Rp. 20.637.326.665,- yang dipergunakan untuk membeli alat cathlab, UPS 120 KVA, X-Ray mobile, meja operasi, syringe pump, dll.

4. Tertata dan terkelolanya sumber daya RS

Sebagaimana dimaklumi salah satu agenda reformasi di bidang keuangan negara adalah dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input tetapi pada output. Pasal 68 dan pasal 69, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Sebagai tindak lanjut atas peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berdasarkan hal diatas pada tahun 2011, RSUD Prov. NTB ditetapkan menjadi PPK-BLUD dimana penggunaan



anggaran sangat fleksibel yang digunakan untuk kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD. Kegiatan tersebut antara lain digunakan untuk biaya operasional, biaya umum dan administrasi, dan biaya pengeluaran investasi.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 yang merupakan revidi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 29 Tahun 2010, kinerja RSUD Provinsi NTB diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah diimplementasikan dalam program/kegiatan sesuai Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja RSUD Prov. NTB dilakukan berdasarkan pada realisasi pencapaian indikator dan target program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Review Renstra 2013-2018, Renja 2016 dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) 2016.

1. Capaian Indikator Kinerja Mendukung RPJMD

Dalam program RPJMD, RSUD Prov. NTB merupakan SKPD pendukung di dalam 31 indikator utama RPJMD 2013 – 2018. Adapun capaian indikator kinerja yang mendukung RPJMD dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.1 Capaian indikator Kinerja Mendukung RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target RPJMD s.d Tahun 2018	Target tahun 2016	Realisasi Kinerja Tahun 2016	(%)
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara	Keg	24	24	5	8,33
			Rp	67.281.050.000	13.345.589.000	3.823.353.052	28,65
2	Tersedianya gedung dan seluruh infrastruktur RSUD prov. NTB di Dasan Cermen sesuai standar RS kelas A	Terbangunnya RSU provinsi di Dasan Cermen	%	100	70	100	100
			Rp	968.251.044.000	192.058.251.000	22.036.356.700	11,47



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target RPJMD s.d Tahun 2018	Target tahun 2016	Realisasi Kinerja Tahun 2016	(%)
3	Terkelola dan terpeliharanya sarana dan prasarana dan kebersihan lingkungan RS secara profesional	Terpeliharanya gedung RS dan alat kesehatan RS	%	95	78	78	100
			Rp	1.577.972.000	313.000.000	4.751.415.815	1.518
4	Tertata dan terkelolanya sumber daya RS	Pelayanan BLUD	Keg	2	2	1	50
			Rp	329.762.875.000	66.952.575.000	115.367.725.920 (pendapatan) 246.842.338.495 (belanja)	368,68

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target kinerja RPJMD yang terdapat pada program RPJMD 2013-2018 merupakan target kinerja gabungan antara RSUD Prov. NTB, RSJ Mutiara Sukma, dan Dikes Prov. NTB. Adapun realisasi kinerja yang tercantum pada tabel diatas merupakan capaian realisasi kinerja yang dicapai oleh RSUD Prov. NTB tahun 2016. Capaian realisasi kinerja sasaran strategis yang mendukung program RPJMD bervariasi, mulai dari 8,33% sampai dengan 100%. Beberapa sasaran yang capaian realisasi keuangannya rendah disebabkan karena penganggaran untuk sasaran strategis tersebut mulai di anggarkan pada anggaran subsidi tahun 2015 yang sebelumnya menggunakan anggaran BLUD. Pada akhir tahun periode RPJMD diharapkan seluruh sasaran strategis dapat terealisasi 100% melalui program dan kegiatan yang selaras dan berkesinambungan.

2. Target dan realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016



Target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja (PK) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 3.2 Target dan realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Formulasi pengukuran	Indikator Kinerja					Program/ Kegiatan	ANGGARAN									
			Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		APBD				APBN					
									MURNI (Rp)	APBD-P	Realisasi	Keu %	Fisik %	(Rp)	Realisasi	%	Fisik %	
1.	Tertata dan terkelolanya kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM rumah sakit secara professional	Jumlah Dokter spesialis yang melanjutkan pendidikan ke sub spesialis	1	jumlah pendidikan dan pelatihan formal SDM RS	Orang	4 org (pendidikan)	1	25	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.740.000.000	1.110.000.000	808.104.334	72,80	64,31				
		Jumlah SDM RS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam 1 periode		Orang	70 orang (diklat)	565	807,14	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	1.740.000.000	1.110.000.000	808.104.334	72,80	64,31					
			Jumlah Sasaran 1						1.740.000.000	1.110.000.000	808.104.334	72,80	64,31					
2.	Tertata dan terkelolanya pelayanan medis rumah sakit secara efisien, safety dan bermutu	Menghtung jumlah pasien tidak mampu yang dilayan selama 1 tahun	2	Jumlah pasien masyarakat miskin/tidak mampudan masalah sosial lainnya yang terlayani	Orang	500	237	47,4	Program Upaya kesehatan masyarakat	1.535.535.000	1.835.535.000	1.818.939.945	99,10	100				
									Kegiatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	1.535.535.000	1.835.535.000	1.818.939.945	99,10	100				
			Jumlah Sasaran 2						1.535.535.000	1.835.535.000	1.818.939.945	99,10	100					
3.	Tersedianya gedung dan seluruh infrastruktur RSUD Prov. NTB di Dasan Cermen sesuai standar RS Kelas A	jumlah gedung yang terbangun sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran yang tersedia	3	jumlah dan jenis gedung serta infrastruktur RS, sarana prasarana dan alat-alat kedokteran/kes ehatan sesuai dengan standar RS A	Unit	2	2	100	Program Pengadaan; peningkatan sarana dan prasara Rumah Sakit	51.903.940.165	55.508.887.365	53.532.198.224	96,44	100				
									Kegiatan Pembangunan rumah sakit	23.901.772.700	23.901.772.700	22.036.356.700	92,20	100				
									Kegiatan pengadaan		27.477.114.665	27.392.850.499	99,69	100				



No	Sasaran Strategis	Formulasi pengukuran	Indikator Kinerja					Program/ Kegiatan	ANGGARAN									
			Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		APBD				APBN					
									MURNI (Rp)	APBD-P	Realisasi	Keu %	Fisik %	(Rp)	Realisasi	%	Fisik %	
								alat – alat kesehatan RS										
								Kegiatan Pengadaan Obat-obatan		2.000.000.000	1.999.463.930	99,97	100					
								Kegiatan Pengadaan ambulance/mobil jenazah		1.200.000.000	1.174.460.750	97,87	100					
								Kegiatan Pengadaan meubeler RS		930.000.000	929.066.345	99,90	100					
					Jumlah Sasaran 3				51.903.904.165	55.508.887.365	53.532.198.224	96,44	100					
4	Tertata dan terkelolanya sumber daya rumah sakit	Jumlah Capaian pendapatan dan belanja selama 1 tahun	4	jumlah pendapatan dan belanja operasional	Rp	80.365.000.000	115.075.520.437	115,08	Program Peningkatan mutu pelayanan BLUD	80.365.000.000	124.195.747.720	115.367.725.920	92,89	100				
		jumlah pasien yang disurvei secara acak yang menyatakan puas dibandingkan jumlah pasien yang disurvei secara acak	5	indeks kepuasan masyarakat	%	80	74,53	93	Kegiatan Pelayanan dan pendukung pelayanan	80.365.000.000	124.195.747.720	115.367.725.920	92,89	100				
					Jumlah Sasaran 4				80.365.000.000	124.195.747.720	115.367.725.920	92,89	92,89					
					Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 + 4				135.544.439.165	182.650.170.085	171.524.968.423	361,23						
					Rata-rata % Realisasi							90,31						



3. Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Anggaran Tahun 2016

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Anggaran 2016

No	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016
I	Program pelayanan administrasi perkantoran			
1	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia	1 tahun	1 tahun; keu:98,31% fisik: 98,31%
2	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan tersedia	15 orang	15 orang; keu:96,31% fisik: 100%
3	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	75 jenis	75 jenis, keu:98,90% fisik: 100%
4	Tersedianya makanan dan minuman	Makanan dan minuman tersedia	5 orang	0 orang, keu:0 fisik : 0
5	Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jasa administrasi dan teknis perkantoran tersedia	5 orang	5 orang, keu:99,73 % fisik : 100%
II	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
6	Tersedianya pemeliharaan kendaraan	Pemeliharaan kendaraan dinas /operasional pejabat tersedia	5 unit	5 unit, keu:100% fisik: 100%
III	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
7	Tertata dan terkelolanya kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM RS secara profesional	Sumber Daya Aparatur yang terdidik dan terlatih tersedia	880 orang	565 orang pelatihan, 1 dokter spesialis ke subspecialis, keu: 72,80% fisik: 72,80%



No	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016
IV	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			
8	Tersedianya penunjang manajemen asset daerah	Penunjang manajemen asset tersedia	1 tahun	1 tahun, keu:44,86%
V	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			
9	Tersedianya dan terkelolanya layanan RS yang aman, efisien, safety dan bermutu	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani	1 tahun	1 tahun, keu:99,10% fisik:100%
VI	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			
10	Tersedianya dan terkelolanya komunikasi, informasi dan edukasi (ide) tentang HIV/AIDS	Frekuensi Informasi tentang HIV/AIDS tersedia	4 keg	4 keg, keu: 77,65% fisik: 100%
VII	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			
11	Tersedianya standart pelayanan kesehatan	Terakreditasinya RSUD Prov. NTB versi 2012	1.408 dokumen	1.408 dokumen keu:74,73% fisik: 100%
VIII	Program pengadaan;peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit			
12	Tersedianya gedung dan seluruh inprastruktur RSUD prov. NTB di Dasan Cermen sesuai standar RS kelas A	RS yang terbangun	2 unit	2 unit. Keu:92,20% fisik : 100%
13	Tersedianya alat kesehatan /kedokteran	Jumlah dan jenis alat kesehatan/kedokteran	1 paket	1 paket, keu:99,69%



No	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016
		RS yang dibeli		fisik:100%
14	Tersedianya obat-obatan RS	Jumlah dan jenis obat-obatan RS yang dibeli	90%	keu:99,97% fisik:100%
15	Tersedianya ambulance/mobil jenazah	Jumlah Kendaraan medis RS bertambah	2 unit	2 unit Keu: 97,87% Fisik : 100%
16	Tersedianya meubeler RS	Jumlah dan jenis Meubeler RS bertambah	90 %	keu : 99,90% fisik : 100%
IX	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit			
17	Terkelola dan terpelihara gedung RS secara profesional	Jumlah gedung yang terpelihara	6 unit	6 unit, keu: 97,07% Fisik: 100%
18	Terkelola dan terpeliharanya alkes di lingkungan RS secara profesional	Jumlah dan jenis alkes yang terpelihara	90%	Keu: 86,86 Fisik : 100%
X	Program peningkatan mutu pelayanan BLUD			
19	Tertata dan terkelolanya sumber daya RS	Jumlah pendapatan dan belanja operasional RS	90%	Pendapatan: 115.075.520.437 (115,08%) Belanja: 115.367.725.920 (92,89%)

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian realisasi kinerja anggaran yang mengacu pada sembilan belas sasaran strategis, kegiatan RSUD Provinsi NTB Tahun 2016 rata-rata realisasinya keuangan sebesar 94,86% dan realisasi fisik 99,42%,

Capaian Realisaasi anggaran pada tahun 2016 tidak tercapai 100% karena adanya efisiensi anggaran dari beberapa program kegiatan dan 1 kegiatan yang merupakan program MTQ untuk pembiayaan makan minum tidak terealisasi karena sudah di tanggung dari panitia penyelenggara MTQ.



4. Realisasi kinerja serta capaian kinerja berdasarkan DPA tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi				
				2012	2013	2014	2015	2016
1	Tersedia dan terkelolanya jasa telepon, air dan listrik, jasa administrasi keuangan, bahan bacaan dan perundang-undangan, makanan dan minuman, jasa administrasi dan teknis perkantoran yang profesional dan kompeten sesuai kebutuhan	Jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa administrasi keuangan, bahan bacaan dan perundang-undangan, makanan dan minuman, administrasi perkantoran yang tersedia	%	79,7	93,8	92,0	72,1	98,8
2	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Peningkatan kinerja yang lebih baik	-	-	-	-	83,7	100
3	Tertata dan terkelolanya kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM RS secara profesional	Terlaksananya pendidikan (dokter spesialis, dokter sub spesialis) dan pelatihan, SDM RS	%	-	64	83,3	66,6	72,8
4	Tertata dan terkelolanya kegiatan manajemen asset/barang milik daerah	Terlaksananya kegiatan manajemen asset/barang milik daerah	%	-	-	-	-	44,9
5	Tertata dan terkelolanya pelayanan medis RS secara efisien, safety dan bermutu	Terlayannya pelayanan masyarakat miskin/tidak mampu dan masalah sosial lainnya dan alkes/kedokteran (DBHCHT)	%	100	95,7	100	98,6	99,1



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi				
				2012	2013	2014	2015	2016
6	Tersedianya informasi tentang HIV/AIDS	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan dan pelatihan PITC	%	-	-	-	48,4	77,7
7	Tertata dan terkelolanya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart	Terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standart / akreditasi versi 2012	%	-	-	-	-	74,7
8	Tersedianya gedung dan seluruh inprastruktur RSUD prov. NTB di Dasan Cermen sesuai standar RS kelas A	Jumlah dan jenis gedung serta inprastruktur RS yang terbangun dan jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran RS yang tersedia	%	74.1	87.2	81,8	94,8	96,5
9	Terkelola dan terpeliharanya sarana dan prasarana dan kebersihan lingkungan RS secara profesional	Gedung dan alat-alat kesehatan/kedokteran yang terpelihara	%	-	-	97,7	76,5	86,9
10	Tertata dan terkelolanya sumber daya RS	Jumlah pendapatan dan belanja operasional RS	%	92.7	93.8	98.9	114,1 (pndptn) 98,6 (belanja)	115,1 (pndptn) 92,9 (belanja)

Bila dilihat dari tabel diatas, tingkat capaian realisasi kinerja tahun 2016 jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya khususnya tahun 2015 terjadi kenaikan capaian realisasi pada semua sasaran strategis. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras di semua bidang. Kenaikan realisasi ini akan berdampak positif terhadap capaian kinerja RSUD Prov. NTB dan Capaian realisasi pendapatan BLUD pada tahun



2016 dari target pendapatan 100.000.000.000 tercapai sebesar Rp.115.294.457.301,56 atau 115 % sedangkan realisasi belanja 115.367.725.920 atau 92,89 % dari target anggaran perubahan sebesar Rp. 124.195.747.720,81

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi.

Berdasarkan paparan hasil kinerja diatas dapat disimpulkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Kebijakan dan Program serta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pengembangan RS antara lain pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang dipergunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan/kedokteran.
- b. Adanya kerjasama dengan berbagai institusi/ lembaga
- c. Adanya Jaminan Kesehatan Nasional dan jaminan asuransi kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan di RSUD Provinsi NTB.
- d. Sebagai RS Pusat Rujukan tertinggi di Provinsi NTB
- e. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- f. Adanya komitmen Manajemen terhadap pengembangan pelayanan RS
- g. Tersedianya SDM RS yang cukup kompeten dan siap dalam mendidik tenaga kesehatan serta pengembangan pelayanan RS

Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala bagi capaian kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun 2016 adalah:

- a. Pemberian bantuan pendidikan pada program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur terkendala oleh belum terbitnya SK tugas belajar dokter karena tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh BKD dan penundaan oleh institusi pendidikan terkait sehingga realisasi anggaran tidak 100%.



- b. Dokumen yang terlambat masuk ke bagian ULP sehingga menghambat proses pengadaan.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

- a. Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan berbagai pihak melalui pertemuan *Show Cause Meeting* (SCM) antara berbagai pihak yang terkait (PPK, rekanan/kontraktor, pengawas/MK dan PTP)
- b. Melakukan koordinasi dengan BKD Prov. NTB dan para dokter yang mengajukan tugas belajar untuk melengkapi berkas persyaratan tugas belajar masing-masing. Berikutnya perlu sosialisasi kembali bagi SDM kesehatan/pegawai RSUD Provinsi NTB mengenai SOP Tugas belajar dan ijin belajar yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Alternatif solusi untuk perbaikan kinerja kedepan adalah:

- a. Sosialisasi kembali bagi SDM kesehatan/pegawai RSUD Provinsi NTB mengenai SOP tugas belajar dan ijin belajar yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- b. Tetap berkoordinasi secara berkesinambungan dengan unit terkait untuk pengadaan.

6. Efisiensi penggunaan sumber daya

- Efisiensi dari penggunaan anggaran tahun 2016 terutama dari nilai penggunaan anggaran belanja pengadaan barang jasa terdapat efisiensi dari penawaran nilai kontrak
- Efisiensi sumber daya manusia dari jumlah tenaga yang tersedia di bandingkan dengan subyek yang di layani
- Pemanpaatan alat-alat canggih yang tersedia di Rumah Sakit bisa mengurangi beban kerja SDM



B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2016

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	66.543.117.600	65.164.573.872	1.378.543.728	97,93
	A Gaji dan tunjangan	50.573.327.600	49.875.981.272	697.346.328	98,67
	B Tambahan penghasilan PNS	15.969.790.000	15.288.592.600	681.197.400	95,73
B	BELANJA LANGSUNG	193.668.729.085	181.677.764.623	11.990.964.462	93,81
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.895.989.000	3.823.353.052	72.635.948	98,14
	Perkantoran				
	A Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.500.000.000	3.441.006.952	58.993.048	98,31
	B Penyediaan jasa administrasi keuangan	150.286.000	144.733.800	5.552.200	96,31
	C Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	100.000.000	98.900.000	1.100.000	98,90
	D Penyediaan makanan dan minuman	6.615.000	0	6.615.000	0,00
	E Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	139.088.000	138.712.300	375.700	99,73
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.000.000	12.000.000	0	100
	a Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (diperuntukkan untuk kegiatan MTQ)	12.000.000	12.000.000	0	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.110.000.000	808.104.334	301.895.666	72,80
	a Pendidikan dan pelatihan formal	1.110.000.000	808.104.334	301.895.666	72,80
4	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	52.330.000	23.475.000	28.855.000	44,86
	a Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah.	52.330.000	23.475.000	28.855.000	44,86
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.835.535.000	1.818.939.945	16.595.055	99,10
	a Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	1.835.535.000	1.818.939.945	16.595.055	99,10
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	86.000.000	66.775.000	19.225.000	77,65
	a Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	86.000.000	66.775.000	19.225.000	77,65
7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.972.240.000	1.473.777.333	498.462.667	74,73
	a Penyusunan standar pelayanan kesehatan	1.972.240.000	1.473.777.333	498.462.667	74,73
8	Program Pengadaan; peningkatan sarpras RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	55.508.887.365	53.532.198.224	1.976.689.141	96,44
	a Pembangunan Rumah Sakit	23.901.772.700	22.036.356.700	1.865.416.000	92,20
	b Pengadaan Alat-alat RS	27.477.114.665	27.392.850.499	84.264.166	99,69
	c Pengadaan Obat-obatan RS	2.000.000.000	1.999.463.930	536.070	99,97
	d Pengadaan ambulance/mobil jenazah	1.200.000.000	1.174.460.750	25.539.250	97,87
	e Pengadaan mebeleur RS	930.000.000	929.066.345	933.655	99,90
9	Program pemeliharaan Sarpras RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	5.000.000.000	4.751.415.815	248.584.185	95,03
	a Pemeliharaan Rutin/Berkala RS	4.000.000.000	3.882.771.315	117.228.685	97,07
	b Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS	1.000.000.000	868.644.500	131.355.500	86,86
10	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	124.195.747.720	115.367.725.920	8.828.021.800	92,89
	a Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	124.195.747.720	115.367.725.920	8.828.021.800	92,89
	TOTAL SKPD	260.211.846.685	246.842.338.495	13.369.508.190	94,86



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi sebesar 93,81% dari target 100%, efisiensi Rp. 66.020.948,- dan anggaran tidak terpakai sebesar 6.615.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan, makanan dan minuman, dan penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran. Dari kelima kegiatan tersebut kegiatan penyediaan makanan dan minuman realisasi 0%, dengan anggaran tidak terpakai sebesar Rp. 6.615.000,-. Hal tersebut dikarenakan penggunaan anggaran seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan MTQ, tetapi selama kegiatan MTQ anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini adalah anggaran di kepanitiaan MTQ.

Program peningkatan sarana dan prasarana dengan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional realisasi keuangan 100%. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini diperuntukkan untuk sewa sarana mobilitas darat (sewa kendaraan) selama kegiatan MTQ.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur realisasi sebesar keuangan 72,80% dari target 100%, hal ini karena jumlah dokter yang melanjutkan tugas belajar dari 5 orang (3 orang dokter umum ke dokter spesialis dan 2 orang dokter spesialis ke sub spesialis), hanya 1 orang dokter (20%) memenuhi syarat administrasi untuk dibayarkan pemberian bantuan tugas belajar sesuai dengan penerbitan SK dari BKD, sedangkan untuk kegiatan pelatihan terealisasi 565 orang dari target 880 (64,21%). Sisa anggaran sebesar Rp. 301.895.666,-.

Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah realisasi keuangan sebesar 44,86% dan fisik sebesar 100%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 28.855.000,-.

Program peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit realisasi keuangan sebesar 77,65% dan realisasi fisik 100%. Efisiensi anggaran sebesar Rp. 19.225.000,-. Program peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide)



pencegahan dan pemberantasan penyakit diperuntukkan bagi penderita HIV-AIDS. Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang program ini antara lain : pelatihan bagi konselor HIV-AIDS, pemeriksaan lab viral-load, pemeriksaan CD4, dan pemberian nutrisi bagi penderita ODHA.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS realisasi keuangan sebesar 96,44% dan fisik 100%. Kegiatan yang dilakukan antara lain: pembangunan RS, pengadaan alat-alat kesehatan RS, pengadaan obat-obatan RS, pengadaan mebeluer RS, dan pengadaan mobil ambulance/jenazah. Program pengadaan, peningkatan sarpras RS efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.976.689.141,-.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit realisasi sebesar 86,86% dari target 100%. Kegiatan ini dipergunakan untuk pemeliharaan gedung-gedung RS dan untuk pemeliharaan alat-alat kesehatan/kalibrasi. Efisiensi anggaran sebesar Rp. 131.355.500,-.

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD realisasi belanja sebesar 92.89% dari target 100%. Adapun realisasi pendapatan BLUD tahun 2016 sebesar Rp. 115.075.520.437 (termasuk pembayaran piutang BPJS tahun 2015 Rp. 21.090.269.142) (115,08%). Kegiatan yang dilakukan pada program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD antara lain digunakan untuk biaya operasional (biaya pelayanan, biaya umum dan administrasi), dan biaya pengeluaran investasi.



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen penetapan kinerja, maka dapat diinterpretasikan keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan RSUD Provinsi NTB serta perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi serta misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategik.

Analisis secara komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan RSUD Provinsi NTB pada Tahun 2016 bila dilihat dari % realisasi fisik dapat disimpulkan berhasil karena semua program dan kegiatan hampir dapat terlaksana 100% , walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang merupakan kendala/hambatan. Kondisi ini dapat dilihat dari rata-rata persentase realisasi keuangan dari seluruh program dan kegiatan telah tercapai sebesar 94,86 % dan realisasi fisik sebesar 99,42%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung sasaran strategis.

Direktur RSUD Provinsi NTB,

dr. H. L. HAMZI FIKRI, MM

Pembina

NIP. 197406212002121007